

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami skripsi yang berjudul “CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*) Dalam Memberdayakan Ekonomi Diffable Daerah Istimewa Yogyakarta” ini, maka penulis perlu memberikan penegasan atau mempertajam terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah :

Pertama, Center for Improving Qualified Activity in Life of people with disabilities (pusat untuk pengembangan kegiatan yang berkualitas dalam kehidupan para penyandang cacat) yang disingkat CIQAL. CIQAL adalah organisasi yang didirikan oleh komunitas penyandang cacat Yogyakarta yang mempunyai komitmen tinggi untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan hak penyandang cacat.¹

Kedua, Pemberdayaan Ekonomi Diffable. Sebelum penulis menguraikan istilah ini secara keseluruhan, terlebih dahulu akan dijelaskan satu persatu dari istilah tersebut. Pemberdayaan dalam bahasa Inggrisnya disebut “*empowerment*”. Menurut Merriam Webster dan Oxford English dictionary kata “*empower*” mengandung dua arti. Pengertian *pertama* adalah *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan,

¹ Lihat Profil CIQAL.

atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Sedangkan dalam pengertian *kedua* berarti *to give ability to or enable* (upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan).² Istilah “pemberdayaan” jika dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.³

Berikut ini istilah-istilah “pemberdayaan”, yang diantaranya dikemukakan oleh Kusnaka Adimihardja, Ginandjar Kartasasmita, dan Paulo Freire.

Kusnaka Adimihardja mendefinisikan pemberdayaan berdasarkan perspektif sosiologi adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya.⁴

Ginandjar Kartasasmita mendefinisikan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu [potensi yang dimiliki oleh manusia atau masyarakat yang dapat dikembangkan], dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁵

Sedangkan menurut Paulo Freire sebagaimana dikutip dari Peter Coleridge, memperkenalkan konsep pemberdayaan melalui apa yang

² Onny S. Prijono, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 3

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Kedua, 1989), hlm. 188

⁴ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaira Utama Press, Cetakan Pertama, 2001), hlm. x

⁵ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDESINDO, Cetakan Pertama, 1996), hlm. 145

disebutnya ‘penyadaran’ (*consciensation*); yakni proses di mana orang-orang tertindas menjadi paham akan akar penyebab penindasan yang mereka alami. Jika proses kesadaran ini telah dilalui, maka mereka bisa mulai melakukan sesuatu untuk mengatasinya.⁶ Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Selanjutnya, istilah ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo ialah segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang menyangkut pilihan terhadap sumber daya yang sifatnya langka dan alokasi sumber daya tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁷

Sedangkan *Diffable* merupakan akronim dari bahasa Inggris *differently of able people* (orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda).⁸ Istilah *diffable* ini merupakan pengganti dari penyebutan terhadap penyandang cacat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat – yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap

⁶ Peter Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, terj. Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, September 1997), hlm. 69-70

⁷ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, November 1999), hlm. 5 dan 12

⁸ Lihat M. Sobirin, “Berdayakan *Diffable* Dengan Pendekatan Komunitas”, dalam *Kedaulatan Rakyat* (21 September 2003), hlm. 8. Penggunaan istilah terhadap “penyandang cacat/ketunaan” sebenarnya masih menjadi perdebatan. Badan kesehatan dunia untuk PBB, WHO, mengusulkan tiga definisi mendasar berikut ini: **Impairment** (kerusakan/kelemahan): ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis. **Disability** (cacat): segala keterbatasan atau ketiadaan kemampuan (sebagai akibat ‘kerusakan’ tadi) untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam batas-batas yang dianggap ‘normal’ bagi manusia. **Handicap** (ketidakmampuan): keadaan yang merugikan bagi seorang, sebagai akibat dari ‘kerusakan/kelemahan’ atau ‘kecacatan’, yang membatasi atau mencegah pemenuhan peranan yang ‘normal’ (tergantung usia, jenis kelamin, serta faktor sosial-budaya) bagi orang itu. Coleridge, *Op. Cit.*, hlm. 137.

orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.⁹ *Diffable* merupakan sebutan yang bertujuan untuk tidak merendahkan, meremehkan dan menghina kepada orang yang menyandang cacat/ketunaan, serta lebih adil untuk digunakan saat ini, agar orang-orang “normal” tidak selalu mendiskreditkan terhadap orang-orang yang selama ini disebut “cacat”. Selain itu, penyebutan terhadap penyandang cacat/ketunaan dengan istilah *diffable* ini, juga merupakan salah satu upaya untuk mensejajarkan para penyandang cacat/ketunaan dengan orang-orang “normal”. Yang dimaksud *diffable* dalam skripsi ini adalah penyandang cacat/ketunaan yang meliputi; tuna daksa (cacat tubuh), tuna netra (tidak dapat melihat), tuna rungu (tidak dapat mendengar), tuna wicara (tidak bisa berbicara), dan tuna grahita (cacat pikiran; lemah daya tangkap).

Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi *diffable* adalah suatu upaya untuk memberikan kemampuan kepada para *diffable* agar dapat berusaha, bertindak dan berbuat demi mempertahankan hak-haknya yang harus diperoleh secara adil sesuai dengan fitrah manusia, sehingga dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para *diffable*.

⁹ Dikutip dari buku kenangan perayaan Yubileum Agung Penyandang Cacat 2000 Keuskupan Agung Jakarta, *Pembebasan Penyandang Cacat Menuju Kesetaraan*, A.D. 2000, hlm. 66

Berdasarkan batasan pengertian dari istilah-istilah tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan yang dimaksud “CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of Poeples with Disabilities*) Dalam Memberdayakan Ekonomi Diffable Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam judul skripsi ini adalah penelitian terhadap upaya yang dilakukan oleh CIQAL dalam memberikan kemampuan kepada diffable yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kualitas sumber daya/potensi, agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga dapat hidup sejahtera, mandiri, hidup bersama dan terpadu di tengah-tengah masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Semua keluarga, pada umumnya menginginkan kehadiran anggota baru (bayi/anak) yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan utuh dan sempurna, senantiasa akan disambut dengan penuh rasa gembira, bahagia dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, tidak semua harapan itu selalu sama seperti apa yang diimpikannya. Kadangkala terjadi sebaliknya, yang dilahirkan adalah sosok manusia yang menyandang ketunaan atau orang “normal” menyebutnya dengan predikat “cacat”, maka rasa kecewa, malu, berdosa, cemas, tersiksa dan bahkan ada yang menganggap sebagai malapetaka yang menimpa kehidupannya. Perasaan yang demikian akan selalu terbersit dalam benak pikirannya dalam kurun waktu yang relatif lama, atau bahkan selama orang yang menyandang cacat itu masih hidup dan menjadi

anggota keluarga.¹⁰ Sebab perasaan itu telah menjadi kultur yang terstruktur di benak masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Kultur tersebut telah menyusup ke semua lapisan masyarakat, yang awal mulanya bisa berasal dari suatu anggapan bahwa penyandang cacat/ketunaan adalah makhluk yang dilahirkan ke dunia sebagai manusia yang tidak beruntung, memalukan, meresahkan, menyusahkan, menderita, dan tidak bisa mandiri (selalu bergantung pada orang lain).

Persepsi yang demikian dapat pula menyebabkan diskriminasi terhadap para *diffable*. Karena prasangka dan diskriminasi adalah dua hal yang ada relevansinya. Keduanya merupakan istilah yang berkaitan. Seseorang yang mempunyai prasangka rasial biasanya bertindak diskriminatif terhadap ras yang diprasangkainya. Tetapi dapat pula orang bertindak diskriminatif tanpa didasari prasangka, dan sebaliknya seorang yang berprasangka dapat saja bertindak tidak diskriminatif. Jadi terdapat perbedaan antara prasangka dengan diskriminasi. Prasangka menunjukkan pada sikap, sedangkan diskriminasi pada tindakan. Kedua tindakan tersebut dapat merugikan pertumbuhan, perkembangan, dan bahkan integrasi masyarakat.¹¹ Prasangka dan diskriminasi ibarat dua sisi mata uang, bisa dibedakan, namun tidak dapat

¹⁰ Coleridge, *Op. Cit.*, hlm. xiii

¹¹ Prasangka merupakan "suatu sikap terhadap anggota kelompok etnis atau ras tertentu, yang terbentuk terlalu cepat tanpa suatu induksi". Prasangka itu muncul sebagai akibat kurangnya pengetahuan, pengertian, dan fakta kehidupan, adanya dominasi kepentingan golongan atau pribadi, dan tidak menyadari atau insaf akan kerugian yang bakal terjadi. Lihat M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, tt.), hlm. 234 -237

dipisahkan. Antara prasangka dan diskriminasi sama-sama menimbulkan tindakan yang negatif dan tidak konstruktif.

Akibat dari prasangka-prasangka seperti di atas, maka tak jarang para *diffable* mendapat perlakuan yang diskriminatif dan tidak adil, baik dari keluarganya maupun masyarakat. Tindakan dan perlakuan yang tidak konstruktif itu akan merintangai pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa serta sosialitas yang kemudian melemahkan segala potensi dan kemampuan penyandang cacat. Sebagai akibatnya, penyandang cacat itu akan tetap tergantung hidupnya pada anggota keluarga yang lain, dan pada gilirannya penyandang cacat akan tetap menjadi beban keluarga, masyarakat, dan negara.¹² Secara otomatis daya kritis dan kreatif *diffable* menjadi hilang. Dengan hilangnya daya kritis dan kreatif itu, maka masa depan mereka yang cemerlang juga sulit untuk diraih dan ditemukan. Padahal masa depan yang cerah merupakan dambaan setiap insan (manusia) yang hidup di muka bumi ini. Dari permasalahan ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu penyebab ketergantungan atau ketidakmandirian mereka (*diffable*) adalah perlakuan orang “normal” yang kurang memberikan rongga kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Artinya para *diffable* bukan sama-sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kreasi dalam hidupnya, akan tetapi karena adanya perlakuan yang tidak konstruktif itulah yang menyebabkan *diffable* sulit untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak seperti manusia lainnya. Akibatnya, potensi mereka hari demi hari

¹² Coleridge, *Op. Cit.*, hlm. xiii

semakin terkikis oleh perlakuan yang tidak konstruktif itu, sehingga diffable mengalami kehilangan kepercayaan diri untuk beraktivitas dan pada akhirnya mereka kehilangan potensi dan jati diri yang berakibat pada posisi kehidupan mereka menjadi tidak berdaya dan tidak mandiri. Ketidakberdayaan dan ketidakmandirian diffable, banyak sekali dijumpai kehidupan mereka di sekitar mall, swalayan, terminal, pertokoan dan di tempat-tempat lain yang kehidupannya hanya bergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta (mengemis). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para diffable berada dalam kondisi keterasingan (alienasi). Terasing dari dirinya sendiri dan manusia menjadi asing pula bagi dirinya, sehingga mereka tidak mampu untuk mengenali dirinya sendiri. Diffable sudah tidak lagi merasakan dirinya berada dalam pelukan zaman dan pengayoman lingkungan. Tetapi bukan hanya itu, mereka juga merasa terancam oleh dunia.

Pada dasarnya diffable sebenarnya tidak hanya membutuhkan belas kasihan dari orang lain, akan tetapi mereka juga merindukan kebebasan untuk bangkit dan berkembang seperti manusia pada umumnya (orang normal), agar hidupnya tidak selalu bergantung pada orang lain. Namun karena adanya stereotip yang terbentuk dalam masyarakat bahwa diffable itu adalah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan, maka secara otomatis hal ini akan membatasi ruang gerak mereka dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Selain kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan masyarakat, nampaknya masalah diffable juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Kecacatan kerap disikapi oleh pemerintah sebagai sebuah problem yang tak perlu diprioritaskan. Perhatian mereka lebih terfokus pada masalah penanganan terorisme, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan bahan bakar minyak (BBM), pembelian perlengkapan keamanan (pembelian pesawat Sukhoy), dan memeriahkan pesta demokrasi (pelaksanaan pemilu 2004) nanti. Itu semua merupakan masalah-masalah yang dianggap mendesak dan tidak dapat ditunda, oleh karenanya, penyandang cacat harus menunggu antri di belakang dalam pemberdayaan dan pengembangannya.

Kurangnya perhatian pemerintah seperti dalam sektor pendidikan. Para diffable banyak yang mengalami kesulitan untuk mengenyam pendidikan, karena sangat terbatasnya fasilitas-fasilitas yang tersedia – seperti gedung sekolah yang masih sedikit dan sulit di jangkau (jauh), kurangnya jumlah guru pembimbing khusus, biaya, dan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai alat bantu belajar bagi diffable. Ini bukan hanya sekedar persepsi tetapi sebuah realitas. Hal ini terbukti dari jumlah diffable yang masih belum mengenyam bangku pendidikan. Di Yogyakarta tercatat sekitar 1.400 diffable yang tergolong dalam usia studi yaitu antara usia 3-15 tahun, yang belum sekolah. Padahal, memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara baik yang normal maupun penyandang ketunaan. Angka tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemerintah dan masyarakat.¹³ Kesulitan

¹³ Jumlah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Rahmadi (Kepala Kasubsi Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Nasional), "1.400 Anak Difable Belum Sekolah", dalam *Kedaulatan Rakyat*, (15 September 2003), hlm. 4

para difable dalam mengenyam pendidikan ini dapat mengakibatkan pada potensi/sumber daya mereka akan semakin lemah.

Lemahnya kualitas sumber daya difable dapat menyulitkan mereka untuk berkembang sehingga dalam memperoleh kesempatan kerja pun kurang mendapatkan kuota. Potensi difable selalu dianggap lemah, tidak produktif, lamban, dan tidak efektif dalam bekerja. Di samping itu, adanya persyaratan yang diajukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dalam merekrut tenaga kerja yaitu mensyaratkan sehat jasmani. Persyaratan ini dapat menyebabkan para difable semakin merasa kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Kalaupun ia sempat menjadi sarjana, umpamanya, masih banyak lapangan kerja yang tertutup baginya – dalam tes yang seolah ‘demokratis’ sekali pun, bila prestasinya tidak benar-benar mencengangkan, perusahaan atau jawatan itu biasanya memilih pelamar yang ‘normal’.¹⁴ Warga cacat merasa diperlakukan tidak adil dengan adanya persyaratan sehat jasmani. Terhadap keadaan ini, Waluyo salah satu warga cacat fisik mengeluh dengan perkataan “orang cacat pun bisa ahli komputer dan bidang-bidang lain yang dimiliki orang sehat jasmani. Diakui, memang untuk beberapa pekerjaan, orang cacat tidak bisa melakukannya. Tetapi tidak semua pekerjaan itu tidak dapat dilakukan oleh orang cacat”. Dengan demikian ia mengharapkan persyaratan tersebut dihilangkan sebagai wujud kepedulian kepada para

¹⁴ Coleridge, *Op. Cit.*, hlm. 86

diffable dalam memberikan kesempatan untuk meraih pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup para diffable.¹⁵

Selain itu, persoalan-persoalan yang dialami oleh para diffable adalah masalah aksesibilitas yang kurang memadai. Umpamanya hal ini nampak dari desain pembangunan yang sebagian besar kurang memihak dan memikirkan untuk para diffable. Sebagai contoh pembangunan tempat tinggal (rumah), tempat ibadah, perkantoran, gedung sekolah, telephone umum atau wartel dan sebagainya yang menggunakan tangga tanpa memikirkan tuna daksa untuk lebih mudah menjangkaunya. Contoh lain juga nampak pada rambu-rambu lalu lintas (lampu merah yang tidak menggunakan alarm) dapat menyulitkan bagi diffable (tuna netra) untuk menyeberang jalan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Kesulitan ini, dapat menyebabkan mereka menjadi orang yang selalu merepotkan orang lain atau bisa dikatakan tidak bisa mandiri (selalu membutuhkan bantuan/pertolongan orang lain).

Atas dasar realitas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para diffable sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya peningkatan kesadaran bersama baik pemerintah maupun masyarakat untuk dapat memahami dan menerima diffable, yang ditandai dengan terwujudnya

¹⁵ Lihat "Untuk Jadi PNS dan CALEG Warga Cacat Diperlakukan Tak Adil", dalam *Kedaulatan Rakyat*, (12 September 2003), hlm. 5

aksesibilitas¹⁶ fisik dan non fisik bagi difable. Aksesibilitas lingkungan fisik yang dimaksud meliputi segala fasilitas umum beserta semua aturan penggunaannya. Sedangkan aksesibilitas lingkungan non fisik yang dimaksud berupa persamaan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, peran politik, jaminan sosial dan kesehatan, informasi dan komunikasi, serta aspek kehidupan dan penghidupan yang lain.

Sebenarnya pemerintah (khususnya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta) tidak lantas tutup mata terhadap permasalahan difable. Berkat perjuangan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya yang menangani masalah difable akhirnya pemerintah dapat merealisasikan pembangunan *guiding block* atau jalur yang khusus dibuat sebagai pemandu bagi tuna netra yang berupa tegel warna kuning di sepanjang trotoar Jl. Malioboro. Akan tetapi *guiding block* tersebut belum dapat difungsikan secara optimal oleh para difable karena jalan tersebut selama ini masih dimanfaatkan untuk area parkir, pedagang atau kepentingan yang lain.¹⁷ Apakah Pemerintah belum mensosialisasikan kepada masyarakat luas atau masyarakat belum menyadari terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para difable?

¹⁶ Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Lihat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1997, dikutip dari buku Yubileum Agung Penyandang Cacat 2000 Keuskupan Agung Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 66

¹⁷ Lihat Ari Kurniawan, "Hak Penca Masih Terabaikan", dalam *Kedaulatan Rakyat* (13 Oktober 2003), hlm. 2

Kendala-kendala yang dihadapi oleh para diffable seperti masalah kultur yang telah tertanam di dalam keluarga diffable maupun masyarakat, sulitnya mengenyam pendidikan, tertutupnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya aksesibilitas yang tersedia dapat menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan diffable terperangkap dalam jurang kemiskinan.

Kemiskinan dan kecacatan ada hubungan yang sangat erat, karena kecacatan juga bisa ditimbulkan oleh kemiskinan seseorang. Salah satu penyebab yang menjadi pemicu terjadinya kecacatan adalah kurangnya kadar gizi, keburukan nutrisi pada ibu yang sedang hamil,¹⁸ program imunisasi yang kurang memadai, dan keadaan rumah yang terlalu sesak atau terlalu banyak penghuni, semua itu punya andil dalam melejitkan jumlah orang miskin yang juga menyandang cacat/ketunaan, jauh melebihi jumlah penyandang cacat yang hidup di lingkungan yang lebih baik (orang kaya). Di samping itu, dampak dari pengucilan yang terus-menerus serta pembatasan akses kaum penyandang cacat terhadap kegiatan ekonomi juga menyebabkan kemiskinan yang sulit untuk ditanggulangi.¹⁹

¹⁸ Menurut Sunyoto Usman bahwa buruknya nutrisi pada ibu yang sedang hamil akan membuat daya tahan tubuh anak-anak yang dilahirkan menjadi buruk. Daya tahan tubuh yang buruk akan menciptakan kondisi fisik dan mental yang buruk pula. Dalam dunia kedokteran, tingkat nutrisi yang jelek secara klinis lazim diidentifikasi dengan kondisi-kondisi seperti jumlah hemoglobin yang rendah, badan yang lemah, dan tingkat energi yang rendah pula. Apabila kekurangan nutrisi ini berlangsung terus menerus dalam kurun waktu yang panjang, dapat menimbulkan depresi yang kronis, masa bodoh dan etos kerja yang rendah. Akibat selanjutnya adalah setelah dewasa kelak sebagian besar dari mereka juga akan menjadi orang yang sulit berdiri sendiri; dan generasi semacam itu cenderung akan melahirkan generasi yang sukar mandiri pula. Lihat. Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, November, 1998), hlm. 23-24

¹⁹ Coleridge, *Op. Cit.*, hlm. 85

Kelemahan ekonomi merupakan bagian yang menyebabkan ketidakberdayaan seseorang, begitu pula bagi para diffable. Kenyataan menggambarkan bahwa orang-orang yang lemah secara ekonomi, kesempatan untuk bersaing memperbaiki tarap hidupnya lebih sulit dari pada orang-orang yang lebih kuat (kaya).

Ketidakberdayaan dan ketidakmandirian diffable ini, sangat dibutuhkan kesadaran bersama (kesadaran kolektif) baik dari kalangan keluarga diffable, masyarakat maupun pemerintah untuk melibatkan para diffable dalam berbagai aspek, demi meningkatnya kualitas atau potensi yang dimiliki sehingga hidup mereka tidak hanya bergantung pada orang lain. Diffable di sini dilibatkan baik sebagai sumber daya pembangunan maupun sebagai insan. Sebagai sumber daya pembangunan, diffable harus ditingkatkan kemampuannya dan dioptimalkan pemanfaatannya. Sedangkan sebagai insan yang mempunyai kodrat kemanusiaan, diffable harus diakui dan ditempatkan secara proporsional sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai kelompok keluarga, masyarakat, dan warga negara. Selain itu, secara keseluruhan upaya peningkatan ini terkait erat dengan pemberdayaan, yang pada pokoknya ingin menempatkan penyandang cacat bukan hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan.

Dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh diffable, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat maupun sebagai warga negara, terutama masalah aksesibilitas yang sangat minim, para diffable timbul suatu inisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi sebagai wadah untuk mengadakan dan

melakukan aktivitas-aktivitas pemberdayaan dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan hidup difable. Organisasi tersebut diberi nama *Center for Improving Qualified Activity in Life of People With Disabilities* (pusat untuk pengembangan kegiatan yang berkualitas dalam kehidupan para penyandang cacat) yang disingkat CIQAL. Organisasi ini sebagaimana disebutkan di atas adalah didirikan oleh komunitas penyandang cacat Yogyakarta yang mempunyai komitmen tinggi untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan hak penyandang cacat. Salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi penyandang cacat (penca) dalam kehidupan bermasyarakat, serta untuk mendorong peningkatan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain; penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyandang cacat meliputi pelatihan, lokakarya, kajian-kajian, penelitian, serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya secara partisipatoris.

Lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang menangani difable, program-program yang menyangkut kecacatan, proyek-proyek yang melibatkan orang-orang cacat, masih didesain dan dilaksanakan oleh kelompok eksklusif orang-orang 'normal'; orang-orang yang tidak memiliki cacat jasmani. Para penyandang cacat sendiri hanya berkerumun di pinggiran, menjadi penonton atau objek pembangunan, tak pernah secara aktif dilibatkan. Mereka tak pernah terwakili dalam proses

pengambilan keputusan.²⁰ Berangkat dari permasalahan penyandang cacat sebagai obyek pembangunan, maka CIQAL berbeda dengan organisasi lainnya, karena organisasi ini lahir dari komunitas diffable, sehingga organisasi ini lebih tahu terhadap kegelisahan yang dirasakan oleh para penyandang cacat itu sendiri dan program yang dilaksanakan oleh CIQAL sesuai dengan aspirasi para diffable. Para diffable tidak hanya dijadikan obyek dari program pemberdayaan yang hanya pantas memperoleh bimbingan, pembinaan, pelayanan dan santunan saja, akan tetapi mereka ikut berperan aktif dalam proses pemberdayaan.

Ada beberapa hal yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti organisasi tersebut diantaranya: *pertama*, organisasi ini dalam memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak diffable tidak hanya sebatas wacana atau konsep saja, akan tetapi dari wacana atau konsep tersebut direalisasikan ke dalam bentuk program secara riil. *Kedua*, pengurus CIQAL terdiri dari para diffable sehingga dalam penentuan program lebih terarah dan mengena terhadap posisi diffable, karena para pengurus mengalami nasib yang sama dengan para diffable pada umumnya. *Ketiga*, CIQAL tidak memetametakan diffable sesuai dengan jenis kecacatannya, akan tetapi organisasi ini berusaha untuk menyatukan semua jenis kecacatan dalam satu komunitas agar terjalin ikatan emosional yang kokoh, selain itu juga untuk menghindari munculnya kelompok-kelompok diffable tertentu sesuai dengan jenis kecacatan atau ketunaan mereka. CIQAL juga terbuka bagi masyarakat umum

²⁰ Coleridge, *Op. Cit.*, hlm. 5

yang simpatik dan tertarik dengan isu kecacatan, untuk bekerja sama dalam rangka memperjuangkan, melindungi, dan membela hak-hak diffable.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini ialah bagaimana pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh CIQAL terhadap diffable Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh *Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities* (CIQAL) terhadap para diffable Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi pengembangan masyarakat Islam khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi diffable. Bagi CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*) sebagai organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap diffable, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka memperjuangkan melindungi, dan membela hak-hak diffable khususnya dalam pemberdayaan ekonomi yang selama ini para diffable diperlakukan dengan perlakuan yang tidak konstruktif.

F. Kerangka Teoritik

1. Paradigma Pemberdayaan

Memasuki abad ke-21, ada satu perubahan yang berkait dengan paradigma yang selama ini menjadi acuan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan peranan negara/pemerintah pada posisi yang sentral dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan. Paradigma ini telah banyak memperoleh kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) salah satu kritik yang dilancarkan oleh para ahli pembangunan dari LSM itu adalah bahwa paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan rakyat jelata dalam membangun diri dan masyarakat mereka sendiri. Di samping itu, paradigma tersebut menghambat timbulnya kearifan lokal sebagai unsur sentral dalam perencanaan suatu pembangunan masyarakat yang berkesinambungan.²¹

Perlunya kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan mulai dirasakan ketika orang melihat semakin banyaknya proyek dan program pembangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Paradigma yang menempatkan negara dan aparatnya sebagai titik sentral dalam proses

²¹ Lockman Soetrisno, "Pemberdayaan Rakyat dalam Masyarakat Madani", dalam Widodo Usman (*et.al.*), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Juni 2000), hlm. 183-184

pembangunan ternyata juga dikritik, karena negara dan aparatnya yang semula dianggap dapat menjadi pendorong pembangunan justru diketahui sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan. Sebagai alternatif diajukan suatu paradigma baru yang dikenal dengan paradigma pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).²² Paradigma ini berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.²³ Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”.²⁴

Empowerment versi Paulo Freire beresensi pada suatu metodologi yang dia sebut sebagai metodologi *conscientization* yaitu suatu proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan politik yang ada dalam suatu masyarakat dan menyusun cara-cara untuk menghilangkan kondisi yang opresif itu dalam masyarakat. Bagi Paulo Freire dengan demikian *empowerment* bukanlah sekedar hanya memberi kesempatan

²² *Ibid.*

²³ Loekman Soetrisno, “Memberdayakan Rakyat Dalam Membangun Indonesia”, dalam *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, Anggito Abimanyu, (et.al.), (Yogyakarta: PAU-SE UGM bekerjasama dengan BPFE, proyek, 1999/2000), hlm. 136

²⁴ Robert Chambers, “*Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?*”, dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (ed.). *People From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press. 1995. Dikutip dari Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, *Op. Cit.*, hlm. 142. Lihat pula Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia yang Bersumber Daya Unggul*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 039, Tahun Ke-8, November 2002, hlm. 863

rakyat menggunakan sumber alam dan dana pembangunan saja, tetapi lebih dari itu *empowerment* merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif, dengan kata lain *empowerment* berarti partisipasi masyarakat dalam politik, sedangkan menurut versi Schumacer *empowerment* kurang berbau politik. Schumacer percaya bahwa manusia itu mampu untuk membangun diri mereka sendiri tanpa mengharuskan terlebih dahulu menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat. Schumacer menyatakan bahwa strategi yang paling tepat untuk menolong si miskin adalah “memberi kail daripada ikan” dengan demikian mereka dapat mandiri.²⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo bahwa strategi untuk “lebih baik memberikan kail daripada ikan” dalam membantu yang lemah; dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Kesemuanya itu dilakukan dengan memfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.²⁶

Dari kedua versi pemikiran tersebut, dapat dikatakan bahwa agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat berhasil dengan baik maka keduanya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Untuk *empowerment* versi Schumacer dengan slogannya yang populer “lebih baik memberi kail daripada ikan”, di sini

²⁵ Anggito Abimanyu, (*et.al.*), *Op. Cit.*, hlm. 140-141.

²⁶ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, Cetakan Pertama, November 1999), hlm. 354

mestinya masyarakat diajari bagaimana cara memancing ikan yang baik. Perlu juga dijamin agar “sungai” atau “danau” yang dipancing terjaga kelestariaannya, dan yang terpenting lagi adalah diberi izin untuk memancing di “sungai” atau “danau” tersebut, dengan demikian versi pemberdayaan masyarakat apapun tetap membutuhkan “dosis politik”.

Strategi pembangunan nasional yang diterapkan selama ini sering mengalami kegagalan, karena kurang memperhatikan dimensi sosial. Maksudnya strategi tersebut mengabaikan partisipasi masyarakat. Menurut pengamat dan ahli pembangunan yang aktif bekerja di negara-negara yang sedang berkembang, kegagalan tersebut disebabkan karena model pembangunan yang tidak memberi kesempatan pada rakyat miskin untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan dan kemudian pelaksanaan program pembangunan, dengan kata lain rakyat miskin hanyalah sekedar obyek dari pembangunan,²⁷ bergitu pula yang dialami oleh para *diffable* hanya mendapatkan bimbingan, pembinaan, pelayanan dan santunan saja, akan tetapi mereka tidak ikut berperan aktif dalam proses pemberdayaan.

Pembangunan yang kurang memberikan kesempatan kepada *diffable* disini, sangat dibutuhkan upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya insensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya

²⁷ Abimanyu, *(et.al.)*, *Op. Cit.*, hlm. 139

sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat.²⁸

2. Pemberdayaan Ekonomi Diffable

Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial termasuk di dalamnya para diffable. Upaya pemberdayaan ekonomi diffable ini menyangkut beberapa segi:

a. Advokasi

Secara eksternal, pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi²⁹ kebijaksanaan ekonomi-politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah dan tertindas tersebut terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau

²⁸ Ginandjar Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan: Perkebangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, Cetakan Pertama, April 1997), hlm. 57

²⁹ Advokasi adalah praktek kerja sosial untuk meningkatkan klien dalam rangka menghadapi diri mereka dengan kehidupan sosial masyarakat. Harry Hikmat, *Op. Cit.*, hlm. 50

terkungkung oleh peraturan-peraturan pemerintah dan pranata sosial yang bias terhadap kepentingan golongan kuat.³⁰

Case advocacy dilakukan oleh para profesional untuk meningkatkan klien agar dapat memperoleh keuntungan dan meningkatkan perubahan sosial untuk kepentingan kelompok sosial.³¹

b. Peningkatan Sumber Daya Diffable

Dalam peningkatan sumber daya dibutuhkan upaya penyadaran dan peningkatan tentang kemampuan untuk menemukan (identifikasi) persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu. Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.³² Di samping penyadaran dan identifikasi persoalan dan permasalahan juga diperlukan adanya penanaman dan pembentukan semangat dan wawasan kewirausahaan, sehingga mempunyai wawasan dan kemampuan melihat peluang dan potensi ekonomi yang ada dalam kehidupan sekitarnya.³³

Semangat dan wawasan wirausaha hanya dapat dibentuk melalui penggalian potensi dan wawasan batin yang dilakukan secara

³⁰ Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 354-355

³¹ Harry Hikmat, *Op. Cit.*, hlm. 50

³² *Ibid.*

³³ Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, November 1997), hlm. 138

sistematis, sehingga dapat berfungsi untuk melihat peluang-peluang usaha yang masih sangat terbuka, baru kemudian latihan ketrampilan akan menjadi bekal ketika mereka akan memasuki dunia usaha, meskipun bisa saja terjadi, justru ketika mereka membuka usaha, sama sekali tidak berkaitan dengan ketrampilan yang pernah diterimanya.³⁴

Melalui pelatihan kewirausahaan ini, setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, di samping diharapkan peserta memiliki pengetahuan teoritis tentang penguasaan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.³⁵

c. Pemagangan

Yang dimaksud dengan pemagangan di sini adalah pemagangan oleh peserta pada perusahaan yang akan dipilih kelak. Tujuan dari pemagangan ini supaya peserta memiliki gambaran tentang rencana usahanya itu, disamping memberikan bekal pengalaman empiris sebagai bagian dari usaha pendalaman, sehingga akan memudahkan baginya dalam merintis usahanya.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 152-153

³⁵ *Ibid.*, hlm. 141

³⁶ *Ibid.*, hlm. 142

Pemagangan ini sangat perlu, karena suasana dan realitas usaha mempunyai karakteristik yang khas, yang berbeda dengan dunia pendidikan atau dunia di luar usaha. Tanpa pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik, akan menyulitkan bagi seseorang yang akan memulai usahanya.³⁷

d. Mitra Usaha

Pendirian kerjasama pemberdayaan ekonomi umat ini juga dimaksudkan untuk membangun jamaah ekonomi, mengingat solidaritas umat dalam kegiatan ekonomi masih sangat lemah, dibandingkan dengan solidaritasnya di bidang sosial-politik. Pemberdayaan ekonomi umat memerlukan adanya jamaah ekonomi yang kuat. Kerja sama ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi umat sebagai wujud jamaah ekonomi harus dilakukan meskipun dalam ruang lingkup yang sangat kecil apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan, pada akhirnya akan menjadi besar juga.³⁸

Penyelenggaraan dan peningkatan jaringan kerja sama sangat dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi diffable. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik pada tataran lokal, regional, nasional maupun internasional.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 144-146

Engking Soewarman Hasan berpendapat bahwa ada beberapa ciri yang harus diperhatikan dalam memantapkan langkah-langkah pendekatan pemberdayaan yaitu:

1. *Community organization*; yang dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok di masyarakat. Pembentukan kelompok sangat dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan. Begitu pula bagi difable pembentukan kelompok sangat dibutuhkan, karena upaya pemberdayaan secara kolektif lebih efektif daripada dilaksanakan secara individual. Kelompok yang dilatarbelakangi oleh kesamaan nasib dan kemampuan akan lebih kuat untuk memperjuangkan keadaan hidupnya kearah yang lebih baik.
2. *Woker self-management and collaboration*; yang bertujuan untuk menyamaratakan atau membagi atau kewenangan dalam gabungan kerja.
3. *Participatory approach*; yang dimaksudkan agar bisa dan mampu mengendalikan sifat dan arah perubahan hidupnya.
4. *Education for justice*; yang bertujuan membantu masyarakat untuk menjadi sadar akan ketidakadilan dan mampu menghadapi sesuatu ketidakadilan.³⁹

Untuk menunjang keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi menurut Ginandjar Kartasmita, dibutuhkan peran administrasi sebagai

³⁹ Engking Soewarman Hasan, *Loc. Cit.*, hlm. 870

suatu pendekatan yang dinamis. Bertitik tolak dari teori pokok manajemen administrasi tersebut terdiri dari:

a. *Perencanaan*

Segala sesuatu harus dimulai dengan perencanaan. Perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat harus meliputi pokok-pokok sebagai berikut. *Pertama*, mengenali masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kesenjangan; *kedua*, mengidentifikasi alternatif untuk memecahkan masalah; dan *ketiga*, menetapkan beberapa alternatif yang dipilih dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas, memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan, serta potensi yang dapat dikembangkan.

b. *Pelaksanaan*

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan pokok. *Pertama*, kegiatan yang dilaksanakan harus terarah bagi atau menguntungkan masyarakat yang lemah, terbelakang dan tertinggal. *Kedua*, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang ingin dilakukan. *Ketiga*, karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kurang berdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama (kooperatif) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah, jenis usaha atau kesamaan

latar belakang. *Keempat*, menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial; di sini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju, anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk lembaga swadaya masyarakat setempat, perguruan tinggi dan sebagainya.

c. *Pengawasan dan Umpan Balik*

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan umpan balik ini sangat besar perannya, karena sebagai konsep upaya ini merupakan pengalaman yang relatif baru bagi birokrasi dan masih belum dipahami secara luas, bahkan mudah untuk diselewengkan. Dapat saja yang terjadi malah sebaliknya, birokrasi bukan memberdayakan, tetapi memperdayakan masyarakat.

d. *Koordinasi*

Koordinasi atau kurangnya koordinasi sering juga merupakan hal yang mengganggu dalam pencapaian sasaran pembangunan secara optimal. Lemahnya koordinasi jelas sangat merugikan karena akan mengakibatkan pemborosan sumberdaya, bahkan kalau berbagai kegiatan itu bertabrakan, akan menyebabkan kegagalan. Penyebab kelemahan dalam koordinasi seringkali adalah terlalu kuatnya rasa “hegemoni sektoral”.⁴⁰

⁴⁰ Kartasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 161-168

G. Metode Penelitian

1. Subyek dan Obyek Penelitian.

Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah mereka yang memegang kunci atau peranan penting pada organisasi CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of Poeples with Disabilities*), seperti pengurus harian yang meliputi: ketua CIQAL, sekretaris, bendahara dan devisi-devisinya.

Obyek penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh CIQAL terhadap difable Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang relevan dengan penelitian, yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Interview

Metode interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi data wawancara.⁴² Bentuk wawancara yang dipakai adalah interview semi-terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban

⁴¹ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 92

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 126

yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁴³ Wawancara ini bersifat bebas dalam arti interview hanya menggunakan pedoman yang merupakan garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan dan dengan menggunakan interview yang mendalam.

Penentuan informan dalam penelitian ini tidak dilakukan secara acak. Akan tetapi peneliti menentukan informan kunci atau *key informan* yang mempunyai kriteria sebagai seseorang yang betul-betul mengerti dan memahami tentang organisasi CIQAL, dalam hal ini adalah pengurus organisasi tersebut yaitu Nuning Suryatiningsih, selaku Ketua CIQAL, Ibnu Sukoco, selaku divisi informasi, Ida Ayu Sudihartini selaku administrasi dan keuangan, Arni Surwanti dan Ari Kurniawan, selaku divisi pemberdayaan ekonomi, Nurul Saadah Andriyani, selaku divisi advokasi dan Sutrisna, selaku divisi rumah tangga. Interview yang dilakukan dengan pelaksana harian CIQAL untuk mengungkap problem yang dihadapi para diffable, langkah-langkah, kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan ekonomi diffable yang dilakukan oleh CIQAL, dan partisipasi diffable dalam upaya pemberdayaan ekonomi tersebut.

⁴³ *Ibid.*, hlm 197

b. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁴ Sedangkan teknik observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu dengan mengamati dan mencatat mengenai partisipasi difable terhadap kegiatan pemberdayaan. Adapun hal-hal yang penulis amati meliputi; pelatihan kegiatan kerajinan Smocks, pelatihan kewirausahaan dan pembentukan koperasi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi difable yang dilakukan oleh CIQAL dan keikutsertaan difable dalam kegiatan tersebut. Selain itu observasi dimaksudkan untuk mengadakan pengecekan hasil interview.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan antara lain; catatan, buku, peraturan, perundang-undangan dan lain sebagainya.⁴⁵ Data ini untuk mendukung atau melengkapi data-data penelitian. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadministrasian berupa sejarah singkat organisasi CIQAL, profil CIQAL, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan catatan-catatan penting lainnya yang berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 202

3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam menganalisa data penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Adapun langkah-langkah analisa data yang pertama kali dilakukan adalah data yang berkaitan dengan penelitian itu telah terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sehingga data tersebut dapat diambil pengertiannya untuk mencapai kesimpulan sebagai hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab. Dimulai dengan pendahuluan pada bab pertama, diikuti bab kedua, yang mengemukakan tentang organisasi yang diteliti yaitu CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of Poople with Disabilities*), bab ketiga membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sebagai jawaban dari masalah pokok yang tertuang dalam bab pertama. Tulisan ini diakhiri dengan bab keempat yaitu berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

Bab I Pendahuluan secara berturut-turut mencakup beberapa bagian sebagai berikut: pertama, penegasan judul merupakan penjelasan tentang spesifikasi dari judul penelitian. Kedua, latar belakang masalah yang berisi tentang pokok-pokok pikiran yang timbul dibenak penulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Ketiga, rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan masalah pokok penelitian. Tujuan penelitian menjadi bagian yang keempat.

Dilanjutkan bagian kelima tentang kegunaan penelitian. Keenam, kerangka teoritik sebagai jawaban secara teori dari rumusan masalah yang menjabarkan tentang paradigma pemberdayaan dan pemberdayaan ekonomi difable. Metode penelitian yang berisi tentang subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data merupakan bagian yang ketujuh. Sistematika penulisan merupakan bagian akhir dari bab I ini.

Bab II Gambaran Umum CIQAL. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang organisasi yang diteliti yang terdiri dari enam bagian: pertama, menguraikan tentang sejarah berdirinya CIQAL. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang visi, misi dan tujuan pada bagian yang kedua. Ketiga, tentang program kerja. Keempat, berisi tentang keorganisasian yang mencakup susunan kepengurusan dan keanggotaan organisasi tersebut. Dan bagian yang kelima adalah menjelaskan tentang fasilitas yang dimiliki dan bab II ini diakhiri dengan penjelasan mengenai sumber dana organisasi tersebut.

Bab III Pemberdayaan Ekonomi Difiable. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai problematika yang dialami oleh para difable. Kemudian bagian kedua berisi penjelasan tentang pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh CIQAL terhadap para difable Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, advokasi. Kedua, peningkatan sumberdaya difable dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan kerajinan Smocks dan pelatihan kewirausahaan. Ketiga, pemagangan. Keempat mitra usaha dan pembentukan koperasi merupakan pembahasan terakhir dalam bab ini.

Akhirnya, dalam Bab IV merupakan penutup dari tulisan ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat dan saran-saran yang juga tertuang dalam bab keempat ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai saat sekarang ini masih ada anggota keluarga diffable, masyarakat, pemerintah dan instansi-instansi lain, yang memberikan stigma negatif kepada para diffable, seperti penilaian bahwa diffable (penyandang cacat) tidak produktif dan tidak mempunyai skill yang layak jual. Sikap tersebut justru menempatkan mereka pada posisi yang diskriminatif dan tidak memberikan keadilan. Sehingga aksesibilitas diffable juga sulit untuk didapatkan demi kelancaran mereka dalam melakukan berbagai aktivitas.

Dari beberapa persoalan diffable seperti ini, maka dibutuhkan kesadaran bersama baik dari keluarga diffable itu sendiri, masyarakat maupun pemerintah untuk menerima mereka di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan bagi mereka yang sebenarnya telah lama didambakannya. Pemberdayaan di sini dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemampuan kepada para diffable agar dapat berusaha, bertindak dan berbuat demi mempertahankan hak-haknya yang harus diperoleh secara adil sesuai dengan fitrah manusia, sehingga dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para diffable.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh CIQAL terhadap para diffable dengan menggunakan beberapa langkah yaitu; advokasi, peningkatan

sumberdaya diffable, pemagangan, mitra usaha, dan pembentukan koperasi. Kelima langkah pemberdayaan ekonomi diffable yang dilakukan oleh CIQAL ini merupakan langkah yang cukup baik, karena langkah yang diterapkan oleh CIQAL adalah satu-kesatuan yang integral untuk merubah kehidupan diffable ke arah yang lebih baik.

Advokasi sebagai langkah awal dalam pemberdayaan ekonomi diffable. Langkah ini dimaksudkan untuk melakukan pendampingan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak diffable, dengan memberikan arahan kepada mereka untuk menemukan jati dirinya. Dengan menemukan jati dirinya, mereka akan tumbuh rasa percaya diri untuk menentukan arah hidup mereka, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Setelah para diffable didampingi, dibela dan dilindungi hak-haknya, maka CIQAL memberikan pengetahuan untuk meningkatkan potensi yang mereka miliki melalui pelatihan karajinan Smocks, dan untuk menjalankan usaha para diffable dibekali dengan wawasan kewirausahaan, agar ketrampilan yang diperoleh dapat diwujudkan dalam sebuah usaha sehingga akan mendapatkan *income* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas penyandang cacat, sehingga kualitas produk mereka dapat diterima oleh pasar dan dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, maka kuota untuk dapat diterima di pasar tenaga kerja semakin terbuka lebih luas lagi.

Langkah berikutnya adalah pemagangan yang dimaksudkan untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ketrampilan yang mereka miliki yang

dilanjutkan dengan mengadakan mitra usaha agar mereka dapat menjalin hubungan kerja sama (*net working*). Hal ini juga dimaksudkan agar jalinan kerja sama mereka semakin luas. Selain itu CIQAL juga membentuk koperasi sebagai wadah untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan masalah perekonomian.

B. Saran-Saran

1. Saran Untuk Organisasi CIQAL

- ⌘ Sesuai dengan maksud berdirinya CIQAL yaitu untuk merangkul semua diffable tanpa membeda-bedakan jenis kecacatannya, maka seharusnya pengurus CIQAL terdiri dari berbagai jenis kecacatan, tidak hanya didominasi oleh tuna daksa (cacat fisik) saja. Agar aspirasi dari semua jenis kecacatan dapat terwakili.
- ⌘ Demi untuk memberdayakan dan memajukan para diffable, khususnya diffable Daerah Istimewa Yogyakarta, teruskan perjuangannya dan kekonsistennannya jangan berhenti di tengah jalan. Dan jangan lupa terhadap visi dan misi yang telah dibangun, karena kalau melupakan tujuan awal bisa saja para diffable hanya dijadikan barang komersial. Seperti isu-isu di organisasi lainnya yang berkembang saat ini bahwa para diffable hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari dana yang dihasilkan tidak dialokasikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

2. Saran Untuk Organisasi Yang Memperjuangkan Para Diffable

✍ Dalam melakukan pemberdayaan dibutuhkan suatu kesabaran, ketabahan dan ketekunan, agar program yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik. Dan yang tak kalah penting lagi adalah konsisten terhadap program yang direncanakan demi keberhasilan pemberdayaan lebih-lebih pemberdayaan terhadap diffable.

3. Saran Untuk Publik

✍ Diffable adalah sosok manusia yang sama seperti kita. Dengan demikian jangan mereka marginalkan dari kehidupan kita, karena marginalisasi merupakan perlakuan yang tidak konstruktif. Jadikanlah mereka di tengah-tengah kehidupan kita sebagai saudara, sahabat dan teman sejati. Dan ingat bahwa kehidupan ini semuanya ada yang mengatur, yaitu sang Khaliq (Allah SWT.). Dan juga jangan lupa bahwa kecacatan bisa terjadi dengan tiba-tiba tanpa kita sadari. Untuk menerima diffable di tengah-tengah kehidupan kita, maka penulis melampirkan kiat-kiat bertemu dan berkomunikasi dengan diffable dibagian lampiran.

Skripsi yang telah tersusun ini, penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum memenuhi kriteria penulisan yang baik serta masih banyak kekurangan-kekurangan baik yang berkaitan dengan kerangka pikir sistematika penulisan, maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang konstruktif dan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999)
- Anggito, Abimanyu, (et.al.), *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: PAU-SE UGM bekerjasama dengan BPFE, proyek, 1999/2000)
- Asy'arie, Musa, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, November 1997)
- Buku Kenangan Perayaan Yubileum Agung Penyandang Cacat 2000 Keuskupan Agung Jakarta, *Pembebasan Penyandang Cacat Menuju Kesetaraan*, A.D. 2000
- Coleridge, Peter, *Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, terj. Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, September 1997)
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaiora Utama Press, Cetakan Pertama, 2001)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDESINDO, Cetakan Pertama, 1996)
- , *Administrasi Pembangunan: Perkebangnan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, Cetakan Pertama, April 1997)
- Ma'ruf WS, Ade dan Heri, Zulfan, *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Prijono, Onny S., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996)
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, November 1999)
- Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, tt.)

Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)

Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, November 1998)

Usman, Widodo, (*et.al.*), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Juni 2000)

Kamus, Koran, Jurnal, dan Dokumen CIQAL

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CIQAL

Arni Surwanti, *Kewirausahaan, Bagaimana Memulai Usaha Baru*, Yogyakarta, Juli 2003

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Kedua, 1989)

Dokumen Sambutan Koordinator Pelatihan pada tanggal 13 September 2003.

Dokumen hasil evaluasi pelatihan smocks

Dokumen *Daftar Nilai Peserta Pelatihan Kerajinan Smocks*.

Dokumen Laporan Kegiatan Pelatihan Kerajinan "Smocks", Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Cacat Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, September 2003

Hasan, Engking Soewarman, "Strategi Menciptakan Manusia yang Bersumber Daya Unggul", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 039, Tahun Ke-8, November 2002

Kurniawan, Ari, "Hak Penca Masih Terabaikan", dalam *Kedaulatan Rakyat* (13 Oktober 2003)

Kirnadi, selaku Direktur Jenderal BINAPENDAGRI, pada saat penutupan pelatihan kerajinan Smocks tanggal 13 September 2003 di gedung B2P3KS (Balai Besar Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Maksudin, "Strategi Pengembangan Potensi dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta", dalam *Aplikasia*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol, II, N. 02 Desember 2001:197-211

"Margiyanti Peserta Terbaik Pelatihan Smock", dalam *Kedaulatan Rakyat*, (14 September 2003)

Mualamah, Siti, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 10 Oktober 2002

Profil CIQAL.

Sejarah Singkat CIQAL.

Sobirin, M., "Berdayakan Difable Dengan Pendekatan Komonitas", dalam *Kedaulatan Rakyat* (21 September 2003)

Rahmadi (Kepala Kasubsi Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Nasional), "1.400 Anak Difable Belum Sekolah", dalam *Kedaulatan Rakyat*, (15 September 2003)

Waluyo, "Untuk Jadi PNS dan CALEG Warga Cacat Diperlakukan Tak Adil", dalam *Kedaulatan Rakyat*, (12 September 2003)